

APLIKASI
TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL
DALAM MASYARAKAT INDONESIA

Oleh
Yoseph Andreas Gual

Sebelum masuk dalam inti tulisan, penulis ingin mengemukakan bahwa tulisan ini tidak akan menggunakan seluruh konsep teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Penulis hanya menggunakan empat konsep penting yakni masyarakat sebagai sebuah sistem, konsep AGIL, empat sistem tindakan dan konsep perubahan. Penulis sengaja hanya mengambil keempat konsep ini dengan alasan keterbatasan ruang (tugas ini diharuskan dibuat dalam lima halaman kuarto dengan jarak tulisan satu setengah spasi) dan relevansi konsep yang ingin dipakai. Implikasinya, tulisan ini kemungkinan tidak menyeluruh dan mendalam namun diharapkan mampu memberikan sedikit kejelasan atas apa yang ingin dibicarakan yakni situasi Indonesia dalam terang Parsons.

Teori fungsionalisme struktural Parsons menganalogikan masyarakat seperti organisme biologis dan berpandangan bahwa dalam masyarakat terdapat keteraturan dan keseimbangan. Keteraturan dan keseimbangan ada karena anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk bersepakat tentang nilai-nilai penting dalam hidup bersama sehingga perbedaan yang ada dapat teratasi. Karena itu, masyarakat adalah sebuah sistem yang terbentuk dari sub-sub sistem yang saling berhubungan, saling bergantung, saling mempengaruhi satu dengan yang lain dan menjalankan fungsi masing-masing demi pencapaian tujuan sistem.

Sebagai sebuah sistem, masyarakat harus menjalankan empat fungsi dasar agar bisa tetap bertahan. Fungsi – fungsi ini adalah seperangkat tindakan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan sistem itu sendiri. Keempat fungsi tersebut biasa dikenal dengan istilah AGIL – *Adaptation* (A), *Goal Attainment* (G), *Integration* (I) dan *Latency* (L). (1) *Adaptation*. Masyarakat sebagai sebuah sistem harus menanggulangi

situasi eksternal yang kritis. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya. (2) *Goal Attainment*. Masyarakat sebagai sebuah sistem harus mengetahui dan mewujudkan tujuannya. (3) *Integration*. Masyarakat sebagai sebuah sistem harus mengatur sub-sub sistem pembentuknya. Masyarakat sebagai sistem juga harus mengelola hubungan antara *Adaption*, *Goal Attainment* dan *Latency*. (4) *Latency*. Masyarakat sebagai sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola – pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi tersebut.

Untuk menjalankan keempat fungsi di atas, Parsons mengemukakan empat sistem tindakan yang perlu dilakukan oleh sebuah sistem (masyarakat). (1) Sistem organisme perilaku/biologis melihat manusia sebagai sebuah sistem. Sistem tindakan ini berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. (2) Sistem kepribadian, melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan itu. (3) Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengagendakan dan mengontrol komponen-komponen pembentuk masyarakat itu. (4) Sistem kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur-struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka dalam berbuat sesuatu.

Berdasarkan skema semacam ini, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi fungsi sistem yakni sistem kultural yang menjalankan fungsi latensi sebagai alat internal dan sistem sosial yang menjalankan fungsi integrasi sebagai hasil internal. Sementara itu, sistem organisme perilaku menjalankan fungsi adaptasi sebagai alat eksternal dan sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan sebagai hasil eksternal.

Dengan setiap sistem menjalankan fungsinya kemungkinan besar masyarakat akan bertumbuh dengan demikian maka akan berubah pula. Perubahan masyarakat juga terjadi karena masyarakat sendiri terbentuk dari sub-subsistem yang berbeda yang menjalankan fungsi yang berbeda pula. Namun Parsons yakin bahwa pertumbuhan dan perubahan itu tidak akan mengakibatkan kekacauan dalam sistem karena sifat alamiah

sistem (masyarakat) selalu menyesuaikan diri guna mencapai keseimbangan dan kesepakatan. Ketika masyarakat berubah subsistem baru terdiferensiasi. Tetapi pada saat yang sama subsistem yang baru tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Inilah proses diferensiasi dalam konsep perubahan Parsons. Dengan demikian, Parson menganut prinsip evolusi dalam perubahan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Parsons termasuk orang yang optimis akan sebuah perubahan.

Konteks Indonesia

Indonesia sebagai sebuah sistem terbentuk dari berbagai macam subsistem baik secara horisontal maupun vertikal. Secara horisontal masyarakat Indonesia berbeda dari sisi budaya, agama, pendidikan, ekonomi, situasi geografis dan spek lainnya. Dari sisi vertikal masyarakat Indonesia terdiri atas lapisan-lapisan sosial. Dari subsistem budaya, masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan banyak sekali variasi bahasa, pola dan pandangan hidup, tradisi, adat dan kebiasaan yang memiliki lapisannya sendiri. Dari segi agama, Indonesia mengakui enam agama resmi ditambah berbagai macam kepercayaan lokal yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan. Tingkat pendidikan dan bidang pendidikan berbeda masyarakat Indonesia bervariasi. Aliran dan afiliasi politik masyarakat Indonesia beragam dan bertingkat. Kelas sosial dan ekonomi masyarakat tidak sama secara signifikan. Secara geografis Indonesia negara kepulauan dan distribusi bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, hukum tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Antara kota dan desa. Indonesia dibentuk antara lain dengan sub-sub sistem ini.

Menurut Parsons, setiap sistem termasuk sistem masyarakat terbentuk dari struktur dan fungsi-fungsi tertentu. Struktur mewakili aspek statis yakni status dan fungsi mewakili aspek dinamis yakni peran masyarakat. Agar sistem itu solid dan mampu bertahan maka kejelasan struktur dan fungsi menjadi sebuah kemutlakan. Dengan struktur dan fungsi yang jelas maka ketertiban dan keseimbangan masyarakat tercapai.

Struktur dan Fungsi Masyarakat Indonesia

Untuk dapat mengatur dan menyatukan berbagai perbedaan yang ada maka dibutuhkan sebuah struktur yang baik. Menurut Parson, sistem masyarakat setidaknya membutuhkan empat struktur yakni sistem ekonomi untuk beraptasi, sistem sistem pemerintahan/politik untuk menentukan dan mencapai tujuan, sistem hukum untuk mengintegrasikan subsistem dan sistem fiduciari yang terdiri atas sistem pendidikan, sistem keluarga dan sistem agama untuk memelihara masyarakat. Walaupun demikian, setiap subsistem ini sebenarnya merupakan sebuah sistem tersendiri, karenanya keempat fungsi tindakan itu pun dijalankan oleh setiap subsistem (sistem mikro) secara kontinyu.

Menurut Parsons, sistem ekonomi dalam sebuah masyarakat berfungsi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui tenaga kerja, produksi dan alokasi. Melalui penyediaan tenaga kerja berkualitas-terampil, lapangan kerja yang memadai-bervariatif dan pola distribusi tenaga kerja-produksi yang merata-adil diharapkan masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya dan mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat internasional. Namun realitas kebangsaan kita ternyata tidak demikian. Sistem produksi masih sentralistik-tidak adil; hanya di daerah tertentu, lapangan kerja yang minim, tenaga kerja tak dibekali skill yang memadai mengakibatkan banyak tenaga kerja yang memilih ikut TKI-TKW. Karena tidak dibekali dengan skill mengakibatkan kemampuan tawar para tenaga kerja kita menjadi rendah. Tenaga kerja kita dipermainkan dan selalu menjadi menjadi korban. Pemerintah mengalami dilema, apakah harus tegas membela warganya, misalnya dengan tidak mengirim lagi, atau bersikap lembek? Kecenderungannya, pemerintah memilih opsi kedua karena memang pemerintah belum mampu membawa perubahan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Menurut Parsons, sistem politik pemerintahan menjalankan tugas mendefinisikan tujuan dan mewujudkan tujuan hidup bersama. Pertanyaan besar sekarang adalah apa tujuan bangsa ini? Berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea kedua, tujuan negara ini berdiri yakni untuk “.....mengantarkan rakyat Indonesia ke

depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” dan alinea keempat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”

Apakah tujuan tersebut sudah terlaksana? Sistem politik Indonesia yang terbagi atas suprastruktur (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dan infrastruktur (partai politik, kelompok kepentingan). Dalam kenyataan keseharian dapat ditangkap bahwa baik suprastruktur maupun infrastruktur belum mampu memobilisir para aktor untuk meraih tujuan yang sudah tertungga dalam UUD. Suprastruktur dan infrastruktur malah terlibat intrik dan main mata untuk mendapatkan kekuasaan, uang, dan popularitas baik untuk kepentingan individual dan atau kelompok.

Selain itu, empat fondasi dasar negara ini, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika masih menjadi topik hangat perbincangan dan aksi. Banyak konflik horisontal akibat isu-isu ini namun nampaknya pemerintah belum mampu menyelesaikannya.

Sistem hukum menurut Parsons menjalankan fungsi berkoordinasi dan mengatur hubungan antarbagian agar berjalan berimbang dan adil. Keadilan merupakan unsur penting dalam integrasi sebuah masyarakat. Banyak konflik yang diakibatkan oleh praktek ketidakadilan dalam masyarakat. Sistem hukum di negara ini ternyata belum mampu menghadirkan keadilan merata bagi seluruh anak bangsa. Korupsi bertumbuh subur hampir di semua aspek kehidupan namun proses penyelesaiannya nampaknya tebang pilih. Berbagai kasus besar tenggelam ditimbun kasus lain yang juga tidak terselesaikan. Bila dihukum maka yang terpidana adalah kaki tangannya bukan sang “bos.” Kelompok-kelompok tertentu menikmati kebebasan hukum walau terlibat masalah hukum sementara sebagian besar masyarakat terpinggirkan oleh hukum itu sendiri. Anggota lembaga peradilan, baik polisi, hakim dan pengacara terlibat perselingkuhan dengan pengusaha dan politisi agar hukum tidak menyentuh

mereka. Hukum sebagai payung terakhir masyarakat mendapat keadilan ternyata malah membawa ketidakadilan bagi masyarakat.

Sistem fiduciari yang terdiri atas sistem keluarga, pendidikan dan agama menurut Parsons menjalankan fungsinya untuk memelihara pola dan mensosialisasikan nilai dan norma kepada anggota masyarakat agar mereka dapat menginternalisasi dan melaksanakannya dalam hidup bermasyarakat. (1) Sistem keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan terutama bagi anggota masyarakat. Namun akibat globalisasi keluarga-keluarga mengalami anomali. Apakah harus mengikuti nilai-nilai tradisional konservatif atau mengikuti pola modern. Ingin mengikuti pola tradisional konservatif ternyata tidak sesuai dengan zaman. Mengikuti pola modern namun pola tersebut masih abu-abu dan kemampuan menerapkannya masih terbatas. Banyak keluarga Indonesia yang berada dalam simpang ini.

(2) Sistem pendidikan. Pendidikan Indonesia sekarang pun banyak mendapat sorotan. Ke arah mana (*quo vadis*) pendidikan nasional? Apakah pendidikan pro rakyat atau pendidikan pro pasar? Pendidikan sangat mahal dan sulit dijangkau bagi rakyat kebanyakan jika ingin mendapatkan pendidikan berkualitas. Di banyak daerah terutama pedalaman, sistem pendidikan masih pincang. Infrastruktur pendidikan masih minim apa lagi kurikulum dan tenaga pendidik. (3) Sistem agama. Agama di Indonesia seperti pedang bermata dua. Di satu sisi mampu membawa perdamaian namun di sisi yang lain menjadi pemicu konflik sosial. Sistem ini sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia dan banyak konflik horisontal karena dipicu olehnya. Negara ini adalah negara yang memiliki agama bukan negara religius. Semua masyarakat punya agama tetapi tidak mampu mengimplementasi keberimanannya dalam realitas hidup bersama. Contoh, korupsi dan berbagai kejahatan lain seharusnya sangat minim karena anggota masyarakat beragama. Kenyataannya, sambil beragama sambil berbuat kejahatan.

Pada titik ini, dapat disimpulkan sistem fiduciari sebagai pemelihara pola pun memiliki potensi merusak bagi masyarakat.

Perubahan Sosial

Paradigma positifis selalu berupaya menggeneralisir semua perbedaan. Fungsionalisme struktural Parsons cenderung positifis. Dalam kerangka pandang ini, Parsons menilai perubahan sosial berjalan secara evolusioner, perlahan, dan mengarah pada proses penyeimbangan. Konsep ini, nampaknya harus dipikirkan kembali saat melihat realitas masyarakat Indonesia yang multikultural. Indonesia sebagai negara plural dan multikultural tidak bisa digeneralisir. Pengalaman pahit masa Orba karena pemerintah cenderung menerapkan politik penyeragaman dan efeknya struktur dan fungsi masyarakat Indonesia secara perlahan mengalami pembusukan.

Pluralisme dan multikulturalisme Indonesia yang syarat potensi positif maupun potensi konflik perlu didekati dengan pendekatan yang lebih dinamis dan peka terhadap perbedaan.